



Mulai Kemarin Pemudik Dilarang Masuk DIY Kendaraan Wajib Putar Balik

YOGYA (KR) - Setelah melalui berbagai pertimbangan serta untuk mengoptimalkan pencegahan Covid-19 di wilayah DIY, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memerintahkan kepada Dinas Perhubungan DIY untuk melarang kendaraan para pemudik terutama dari zona merah masuk ke wilayah DIY. Konsekuensi dari keputusan tersebut, mulai Minggu (26/4) para pengendara yang setelah diperiksa oleh petugas di tiga titik daerah perbatasan DIY dan Jawa Tengah kedatangan ingin mudik ke DIY, diminta putar balik.

"Saya mendapatkan perintah langsung dari Bapak Gubernur, Minggu (26/4) siang, supaya para pemudik diminta putar balik. Melalui keputusan itu diharapkan bisa menunjukkan bahwa Pemerintah konsisten dalam menerbitkan aturan. Mengingat bandara yang ada di DIY juga sudah ditutup, sehingga pintu darat juga sebaiknya mengikuti untuk ditutup dari pemudik, meski sebenarnya sesuai Permenhub hanya daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang boleh ditutup," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Tavip Agus Rayanto di Yogyakarta, Minggu (26/4).

Menurut Tavip, selain untuk mengoptimalkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di DIY, kebijakan itu juga karena diketahui daerah lain yang berbatasan dengan DIY seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, sudah memberlakukan penutupan. Dikhawatirkan, jika DIY tidak melakukan

* Bersambung hal 7 kol 1

Kendaraan

penutupan, nantinya justru bisa menjadi episcentrum baru penularan Covid-19. Untuk mengantisipasi hal itu, petugas terus berupaya memperkuat pemeriksaan, khususnya terhadap pemudik.

Seperti yang dilakukan di tiga pos penjagaan utama di daerah perbatasan, yaitu di Temon Kulonprogo, serta Tempel dan Prambanan Sleman. Pemeriksaan dilakukan dengan skrining termasuk pengecekan suhu dan jaga jarak fisik penumpang. Jika diketahui mereka pemudik yang ingin masuk DIY, langsung diminta putar balik.

"Kalau mudik biasanya kelihatan barang bawaan tas banyak, penumpang tampak capek karena habis perjalanan jauh. Meski demikian, karena banyak warga DIY yang menggunakan kendaraan bermotor polisi luar DIY, maka masih diperbolehkan untuk masuk. Petugas di lapangan yang mengambil peran besar melakukan pengawasan lebih ketat dengan melihat barang bawaan kendaraan roda empat serta beberapa hal lainnya, sebelum meminta kendaraan memutar balik," papar Tavip.

Koordinator Pengamanan dan Peningkatan Hukum Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY Noviar Rahmad menyampaikan, pihaknya terus menggelar operasi rutin penertiban dan penyuluhan di berbagai lokasi rawan keramaian setiap harinya. Hal ini untuk memastikan *physical distancing* benar-benar diterapkan demi mengendalikan penyebaran virus Korona.

"Kami sudah melangkah sama seperti Dishub meskipun DIY belum PSBB, tetapi tindakan kita tegas untuk membubarkan kerumunan. Bagi tempat-tempat usaha yang masih ada kerumunan orang, sudah membuat surat pernyataan tidak akan melanggar *physical distancing*," ujar Noviar.

Noviar menjelaskan, apabila masih tetap ditemukan kerumunan akan diberikan surat teguran pertama hingga ketiga, kemudian pemanggilan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

DIY. Pihaknya sudah menerima setidaknya 10 surat pernyataan pada Sabtu (25/4), namun belum sampai ada pemanggilan.

"Kami menemukan kasus baru kerumunan di beberapa ruas jalan berupa fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Jadi ada pendatang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur datang ke DIY pura-pura menjadi warga miskin atau pemulung memakai gerobak kemudian berada pinggir jalan menunggu orang memberikan bantuan. Kalau pengumpulan massa sudah sering kita bubarkan," ungkap Noviar.

Kepala Satpol PP DIY ini menuturkan, menghadapi fenomena PMKS di bulan Ramadan sekaligus masa tanggap darurat Covid-19 ini, pihaknya telah melakukan pembinaan kepada 21 PMKS pada Sabtu (25/4). Namun persoalannya, pihaknya belum bisa ke Tim Assessment Dinas Sosial DIY seperti setiap ada razia PMKS atau gelandangan dan pengemis (gepeng) di lapangan, karena selama Covid-19 ini ditutup.

"Jadi kita imbau kepada donatur agar menyalurkan bantuannya kepada lembaga atau yayasan yang tepat, jangan di pinggir jalan karena akan mengundang permasalahan hingga terjadi penumpukan massa. Kita imbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, itu kuncinya karena DIY masih tanggap darurat Covid-19 sampai 29 Mei 2020," tandas Noviar.

Dalam operasi penertiban penumpukan massa tersebut pihaknya melakukan operasi gabungan melibatkan TNI dan Polri secara terpadu sebanyak tiga kali yaitu shift pertama pukul 09.00-13.00, shift kedua pukul 13.00-17.30 dan shift ketiga pukul 19.00-24.00 WIB. Setiap hari, diterjunkan 120 personel gabungan, dimana rata-rata bisa membubarkan 20-30 kerumunan serta memberikan penyuluhan penggunaan masker kepada ratusan masyarakat.

"Kami berbagi tugas dengan kabupaten, di dalam kawasan Ringroad menjadi

Sambungan hal 1

area patroli Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta. Di luar itu ditangani masing-masing Pemkab. Kami akan mewadahi laporan dari masyarakat melalui Call Center @satpolppdiy di nomor 0813-2539-8451 dan nomor 0274-5021060," kata Noviar.

Kendati kendaraan pemudik dilarang masuk DIY, namun masih ada potensi pemudik dari daerah pandemi Covid-19 berhasil lolos masuk wilayah DIY melewati ruas Jalan Kabupaten maupun 'jalan tikus' di wilayah perbatasan Kabupaten Kulonprogo, DIY dengan Kabupaten Purworejo, Jateng.

Dari pemantauan wilayah perbatasan Kulonprogo dengan Purworejo, Minggu (26/4), telah dilakukan penutupan Underpass Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) di ruas Jalur Jalan Lintas Selatan (JLS). Kendaraan dari arah Barat (Purworejo) dialihkan ke Jalan Nasional Jalur Selatan.

Semua kendaraan berplat nomor polisi dari luar daerah menjalani pemeriksaan di Posko Terpadu Penanganan Covid-19 di Temon Kulonprogo. Sebagian yang melewati Jalan Kabupaten di Jurangkah, Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen, Purworejo masuk Kulonprogo tanpa melalui pemeriksaan.

"Bagi pemudik yang tahu, memilih melewati jalur ini. Ada peningkatan volume kendaraan dibandingkan hari-hari biasa di sini," ujar Damarjati, warga Purworejo yang kesehariannya melewati Jalan Jangkaran-Tambak, Wates.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kulonprogo L. Bowo Pristiyanto menyatakan, didirikan beberapa pos pemeriksaan analog kendaraan dari luar daerah masuk wilayah Kulonprogo. Antara lain di Jagalan, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang yang berbatasan dengan Kabupaten Magelang. Kemudian di Plono, Kapanewon Samigaluh dan di Jalan Jurangkah-Hargomulyo yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.

(Ria/Ira/Ras)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005